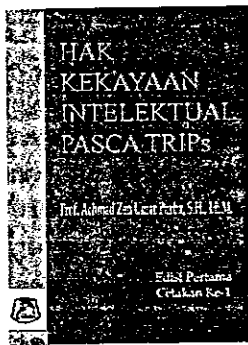


Book Review

Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs

Penulis : Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M
 Peresensi/ Reviewer : Keke Viernia, SH
 Tebal Buku : 409 hal
 Bahasa : Indonesia
 Ukuran : 14,5 x 20,5 cm
 ISBN : 979-41-4002-3
 Penerbit : P.T. ALUMNI



Paham tentang hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) ternyata masih terasa asing dan sering dianggap remeh oleh sebagian kalangan. Bahkan, sejumlah kalangan terpelajar masih campur aduk dalam menggunakan berbagai istilah yang berkaitan dengan HKI, seperti “hak cipta”, “paten”, dan “merk”. Padahal, kenyataannya HKI tersebut melayani masyarakat serta hidup dalam masyarakat itu sendiri. Memasuki milenium

baru, HKI menjadi isu sangat penting yang selalu mendapat perhatian baru dalam forum nasional, maupun internasional. Terbentuknya Paket Persetujuan Pendirian *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994, termasuk di dalamnya Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), menandakan dimulainya era perkembangan HKI di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan demikian, pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi.

Dari kenyataan di atas, maka publikasi apapun tentang HKI menjadi sangat penting. Buku yang merupakan penggalan hasil penelitian mandiri untuk pemenuhan persyaratan guru besar karya

Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M ini secara umum mampu menjadi salah satu literatur yang komprehensif bagi praktisi, akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat luas yang ingin memahami masalah HKI.

Buku ini diawali dengan penjabaran mengenai latar belakang berlakunya HKI dan menyinggung mengenai konsep HKI yang terus menjalani proses. Dimasukkannya HKI sebagai bagian dari sistem perdagangan internasional adalah contoh dari proses tersebut. HKI pun kemudian mengalami pemekaran dengan dirumuskannya HKI menjadi 7 bidang, yakni hak cipta, paten, merk, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Buku ini selanjutnya menguraikan pula lima jenis prinsip dasar yang secara teoritis termuat dalam HKI, yaitu hak otoritas, hak privat dan pasar, prinsip berkesinambungan, satu kesatuan, dan TRIPs mengikat.

Mengenai prinsip-prinsip dasar dan substansi pengaturan dalam TRIPs dijelaskan secara rinci pada bab II buku ini. Melalui pembahasan ini kita dapat mengetahui dengan jelas perbedaan antara 7 bidang HKI seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Ketujuh bidang HKI ini dikupas secara menyeluruh dalam bab ini. Seperti diketahui, bahwa peraturan yang baik tidak ada artinya jika tidak ditegakkan secara hukum, begitu pula dengan HKI. Untuk itu, Penulis kemudian menambahkan pembahasan mengenai ketentuan khusus dalam TRIPs tentang *Enforcement of Intellectual Property Rights* yang terdapat dalam *Part III*. Namun demikian, TRIPs bukanlah titik awal tumbuhnya konsep HKI. Berbagai konvensi internasional mengenai HKI telah sejak lama dilahirkan, dan telah beberapa kali diubah. Misalnya, *Paris Convention* yang menjadi dasar utama bagi konsep *industrial property* dan juga *Berne Convention* untuk bidang *copyright*. Selain dua konvensi ini, TRIPs juga merujuk pada beberapa perjanjian lain, yaitu *Rome Convention*, *Washington Treaty*, *GATT 1994*, serta *Understandings on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*. Mengenai substansi dari konvensi-konvensi serta perjanjian-perjanjian tersebut yang berhubungan dengan HKI juga diuraikan secara matang dalam buku ini.

Selanjutnya, Bab II buku ini juga menjabarkan persepsi negara-negara berkembang mengenai masalah HKI serta kemungkinan jalan keluar terhadap berbagai kontroversi yang ditampilkan. Buku ini menguraikan dua isu besar yang meliputi permasalahan HKI dalam negara-negara berkembang. *Pertama*, pengamanan hak-hak negara berkembang atas segala kekayaan mereka karena secara kebetulan banyak negara berkembang yang memiliki sumber daya alam berlimpah. *Kedua*, masalah akses terhadap teknologi. Penulis kemudian sampai pada kesimpulan bahwa untuk menghadapi permasalahan HKI ini, negara-negara berkembang butuh penataan ekonomi dunia baru.

Bab III buku ini kemudian memfokuskan pada praktek Indonesia dalam melaksanakan sistem HKI nasional, baik pada masa pra maupun pasca TRIPs. Pembahasan dimulai dari tinjauan atas dasar konstitusional dan kebijakan nasional yang ditempuh serta berbagai undang-undang yang menerapkan dasar-dasar konstitusional dari kebijakan nasional tersebut. Pada bagian ini dijelaskan mengenai perubahan pertama hingga terakhir terhadap undang-undang yang berkaitan dengan masalah HKI karena harus lebih disesuaikan dengan TRIPs. Perubahan terakhir antara lain terbentuknya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Di Indonesia sendiri, konsep HKI yang sudah lama dikenal adalah hak cipta, merek, dan paten. Sementara itu, bidang-bidang lain, walaupun sebagian besar sudah dikenal di luar negeri, masih sangat baru bagi Indonesia. Bidang-bidang tersebut, antara lain desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Untuk itu, Penulis kemudian menguraikan legislasi nasional mengenai bidang-bidang tersebut.

Setelah membahas implementasi TRIPs dalam undang-undang nasional mengenai hak kekayaan intelektual, Buku ini juga kemudian membicarakan mengenai implementasi sistem HKI di luar aspek legislasi pada Bab IV. Dalam bab ini akan ditampilkan hasil penelitian mengenai praktek Indonesia dalam melaksanakan sistem HKI ditinjau dari aspek-aspek di luar pengaturan, seperti aspek administrasi/organisasi, keuangan, kerjasama, dan sosialisasi, serta aspek-aspek penegakan hukum. Pada akhirnya, dalam Bab V

Penulis menghimbau agar pelaksanaan sistem HKI dilakukan secara koordinatif guna mengoptimalkan beberapa isu pokok, seperti peningkatan kesadaran masyarakat melalui langkah sosialisasi dan penegakan hukum. Koordinasi ini juga berarti melibatkan berbagai lembaga lain, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi, serta lembaga-lembaga non-pemerintah.

Buku yang memiliki 409 halaman ini juga dilengkapi dengan sebelas lampiran pada lampiran akhirnya. Lampiran-lampiran tersebut adalah *Agreement on TRIPS*, *Agreement between WIPO and WTO*, *Paris Convention*, *Berne Convention*, *Rome Convention*, *Washington Treaty*, *GATT 1995*, *WTO Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*, Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2001, *Special 301 and Section 301 US Trade Act of 1974*, dan *2002 Special 301 Report by USTR*.